

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TANGGAMUS

Denvilia Oktafiani

*Program Strata Satu Jurusan Sistem Informasi
STMIK Pringsewu, Lampung*

*Jl. Wisma Rini No. 09 Pringsewu, Lampung, Indonesia Telp./Fax : 0729-22240
E-mail: denvilia_ok@yahoo.com*

ABSTRAK

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yaitu dengan dikembangkannya E-Government yang dapat meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik secara lebih luas. Salah satunya pada pemerintahan Kabupaten Tanggamus. E-Government tersebut diwujudkan dengan dibuatnya website pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dengan adanya e-government tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang perkembangan pelayanan masyarakat yang ada dalam pemerintahan dengan jangkauan yang luas, akses yang cepat, dimanapun dan kapanpun.

Kata Kunci: e-government, pelayanan publik, internet, website.

1. Pendahuluan

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Informasi sudah semakin mudah diperoleh, semakin bervariasi bentuknya dan semakin banyak pula kegunaannya. Contohnya adalah pemanfaatan internet sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem informasi pemerintah daerah yang dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada publik, apabila sistem di dalamnya telah berjalan dengan baik dan adanya kerjasama dari berbagai pihak yang ada didalamnya.

Pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pemerintah, tak terkecuali pemerintah daerah.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik atau sering disebut *e-government (eletronic-government)*.

Pembuatan e-government berbasis web ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh data dan informasi perkembangan

pembangunan dan layanan publik dalam pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanggamus dengan akses dan jangkauan yang luas serta dapat diperoleh secara cepat, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas rancangan tentang :
”PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TANGGAMUS”.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode tersebut dapat mengarahkan penyusunan dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

Untuk memperoleh data yang otentik dan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku penunjang dan literatur, jurnal, laporan, peraturan pemerintah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung ke objek penelitian.

c. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan dialog dan tanya jawab antara peneliti dengan informan yang bersangkutan dengan objek penelitian.

3. Tinjauan Pustaka

3.1 E-Government

Diambil dari artikel Implementasi E-Government Di Indonesia, pengertian e-government dijabarkan sebagai berikut :

Definisi E-Government menurut Holmes (2000), adalah sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya”.

Sedangkan penulis lain (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinikan : “E-government merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi hubungan

antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis”.

Sementara itu, terkait dengan administrasi publik, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan e-government sebagai: “memanfaatkan internet dan *world-wide-web* untuk mengirimkan informasi dan layanan pemerintahan kepada masyarakat” (UN-DPEPA, 2002 : Dalam Jurnal Wawan Wiraatmaja, 2006). Dari definisi tersebut terlihat bahwa e-government terkait tidak hanya masalah informasi pemerintahan saja tetapi juga berkaitan dengan tata pemerintahan yang berhubungan dengan layanan (pelayanan) kepada masyarakat.

3.2 Pelayanan Publik

Diambil dari artikel Standar Pelayanan Publik Di Daerah oleh Yogi. & Ikhsan, pengertian pelayanan publik dijabarkan sebagai berikut :

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain”.

Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa Inggris (*public*), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Publik dalam pengertian umum

atau masyarakat dapat kita temukan dalam istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), dan *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public interest* (kepentingan umum) dll.

Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan *public sector* (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama dan sebangun dengan pengertian masyarakat.

Nurcholish (2005) memberikan pengertian publik sebagai “sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Sedangkan pengertian *service* dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagai “*a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company*”. Oleh karenanya,

pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.

3.3 Web

Web Browser adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan halaman website yang berada di internet (Swastikayana, 2011 : Dalam Jurnal Taufik Nurdiawan dkk, 2012).

Web server adalah aplikasi yang berfungsi untuk melayani permintaan pemanggilan alamat dari pengguna *web browser*, dimana *web server* mengirimkan kembali informasi yang diminta tersebut melalui HTTP (Hypertext Transfer Protocol) untuk ditampilkan ke layar monitor komputer. Agar dapat mengubah isi dari *website* yang dibuat, dibutuhkan program seperti PHP (Anhar, 2009 : Dalam Jurnal Zulfadli dkk, 2012).

Layanan sebuah website yang sering disebut *www (world wide web)* merupakan sebuah file yang asal mulanya harus dibuat dengan bahasa HTML (*Hyper Text Markup Language*) yang kemudian dapat dibuat dengan berbagai macam perangkat lunak seperti Dreamweaver dan lain-lain akan

memberikan dukungan tampilan yang lebih interaktif dan *user friendly* untuk menelusuri dan mendapatkan data serta informasi dari internet (Eko Nugroho, 2008 : 49-53)

4. Hasil

Berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemerintahan di Kabupaten Tanggamus memberikan perkembangan data dan informasi tentang layanan publik dalam dinas masing-masing kepada admin website Kabupaten Tanggamus untuk dikelola dan dimasukkan dalam database website tersebut. Kemudian admin akan mempublikasikan data dan informasi tersebut kepada masyarakat publik melalui website Kabupaten Tanggamus.

Penjelasan system e-government yang diteliti disajikan dengan menggunakan Diagram Konteks dan Data Flow Diagram (DFD) yang meliputi DFD level-0 dan DFD level-1.

Diagram Konteks merupakan gambaran sederhana aliran informasi dan data yang akan dilakukan oleh system yang akan dirancang. Diagram ini berfungsi menghubungkan antara *entity* luar, masukan dan keluaran dari sistem. Kemudian direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem.

DFD merupakan alat pemodelan dari proses analisis kebutuhan perangkat

lunak serta detail rancangan dari diagram konteks yang sudah dibuat yang memuat rancangan tabel database yang akan diimplementasikan pada sistem yang akan dibuat. Diagram ini menggambarkan aliran data dalam sistem, sumber dan tujuan data, proses yang mengolah data tersebut, dan tempat penyimpanan datanya. Ada empat elemen yang membentuk suatu DFD, yaitu :

a. Aliran data (Data Flow)

Merupakan penghubung antar proses yang merepresentasikan informasi yang dibutuhkan proses sebagai masukan atau informasi yang dihasilkan proses sebagai keluaran.

b. Proses

Menjelaskan proses-proses transformasi data apa saja yang ada dalam sistem atau yang harus dikerjakan oleh sistem.

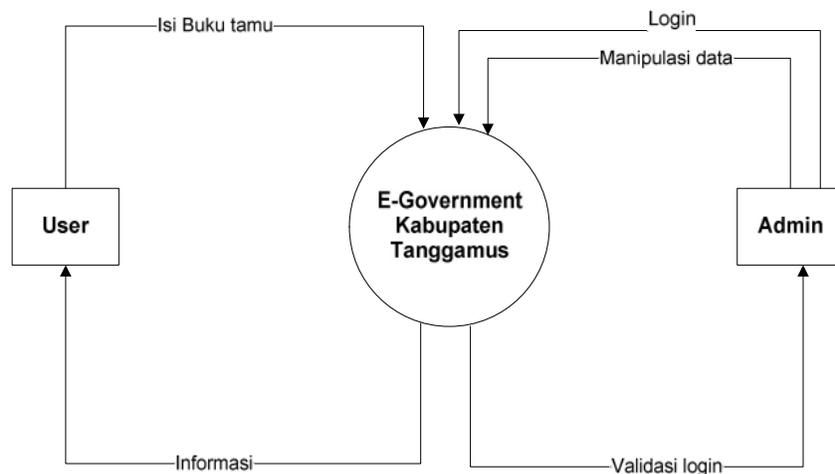
c. Penyimpanan data (Data Store)

Merupakan tempat penyimpanan data atau tempat data yang dirujuk oleh proses.

d. Sumber/tujuan data

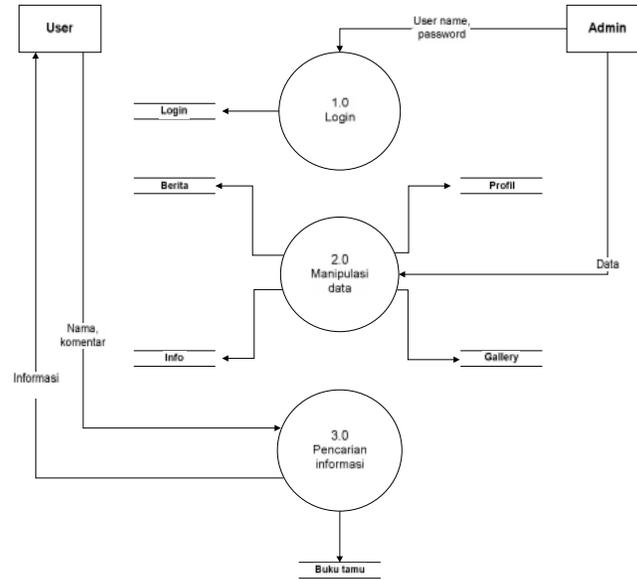
Menggambarkan entitas yang berinteraksi dengan sistem yang berada di luar ruang lingkup sistem (bukan yang menjalankan sistem tersebut) atau entitas yang berfungsi sebagai producer/consumer dari sistem (sumber atau tujuan data). (Eddy Prasetyo Nugroho dkk, 2009 : Dalam Jurnal Rio Fathurochman dkk, 2010)

4.1 Diagram Konteks



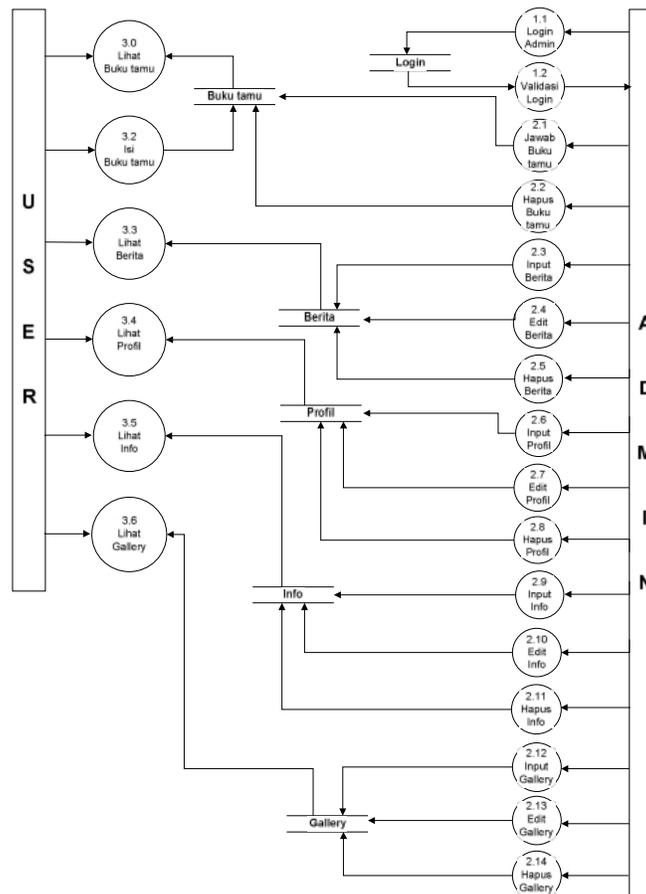
Gambar 1. Diagram Konteks

4.2 Data Flow Diagram (DFD) Level-0



Gambar 2. DFD Level-0

4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level-1



Gambar 3. DFD Level-1

5. Pembahasan

Pengembangan e-government pada Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada website Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang diuraikan sebagai berikut :

5.1 Halaman Awal/Berita



Gambar 4. Tampilan Halaman Awal Website

Halaman ini merupakan halaman awal dari e-government Kabupaten Tanggamus yang memiliki menu antara lain : Berita, Profil, Info SKPD, Gallery, Buku Tamu dan Login.

5.2 Halaman Login



Gambar 5. Tampilan Menu Log In Admin

Halaman ini merupakan tampilan halaman login admin Kabupaten Tanggamus. Apabila admin akan memasuki halaman admin untuk memanipulasi data, maka admin harus menginputkan user name dan password.

5.3 Halaman Info SKPD



Gambar 6. Tampilan Halaman Info SKPD

Halaman ini merupakan tampilan halaman Info SKPD Kabupaten Tanggamus yang memuat informasi Berbagai Dinas, Badan Organisasi dan Kantor-kantor yang terkait dengan pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Dalam halaman ini, user dapat memperoleh informasi perkembangan pembangunan dan pelayanan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanggamus.

6. Kesimpulan

Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi dalam melaksanakan pengembangan e-government. Dengan adanya situs web tersebut diharapkan agar masyarakat publik dapat dengan mudah dalam memperoleh data dan informasi perkembangan pembangunan dan layanan publik dalam pemerintahan yang ada, yang dapat diakses dengan jangkauan yang luas serta dapat diperoleh secara cepat, dimanapun dan kapanpun.

7. DAFTAR PUSTAKA

—————. 2010. *Implementasi E-Government Di Indonesia*
Fathurochman, Rio dkk. 2010. *Sistem Informasi Kerja Industri Berbasis Web (Studi Kasus : Politeknik Telkom)*. Bandung : Politeknik Telkom

Nugroho, Eko. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset
Nurdiawan, Taufik dkk. 2012. *Aplikasi Informasi Pariwisata Berbasis Multimedia (Studi Kasus : Kota Cilacap)*. Bandung : Politeknik Telkom
Wiraatmaja, Wawan. 2006. *Desain Implementasi Prototipe Sistem Portal E-Government Di Indonesia*. (Tesis). Bogor. Institut Pertanian Bogor
Yogi & Ikhsan. *Standar Pelayanan Publik Di Daerah*
Zulfadli dkk. 2012. *Sistem Informasi Prasyarat Mata Kuliah Berbasis Web (Studi Kasus Jurusan Teknik Eektro Unsyiah)*. Banda Aceh : Kitektro